



Australian Government

Dokumen Kependudukan Bantu Korban Gempa Lombok Utara Lanjutkan Hidup



Bupati Lombok Utara periode 2015—2020, Najmul Akhyar memberikan dokumen adminduk kepada anggota masyarakat korban gempa di Lombok.

Gempa yang mengguncang Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur pada tahun 2018 mengambil banyak korban jiwa. Banyak penduduk juga kehilangan tempat tinggal serta harta benda. KOMPAK berinisiatif membentuk layanan Adminduk pasca gempa, bekerja sama dengan Pokja Adminduk di masing-masing desa dan Disdukcapil untuk memastikan warga memiliki kelengkapan dokumen kependudukan untuk dapat mengakses bantuan Rumah Tahan Gempa (RTG) serta berbagai bantuan pemerintah lainnya yang sangat diperlukan di masa bencana.

Ahmawi sedang menikmati kopi paginya ketika gempa dengan kekuatan 6.4 skala richter mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, di pagi hari tanggal 29 Juli 2018. Ia segera berlari menuju area lapangan di dekat rumahnya, di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan. “Keadaan panik, masyarakat berhamburan, lari, cari tempat perlindungan,” kenang pria berusia 40 tahun ini.

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

Akibat gempa tersebut, Ahmawi harus kehilangan tempat tinggal dan kiosnya. "Rumah hancur, etalase hancur, barang-barang juga, habis sudah semuanya," tutur ayah dua anak ini. Pria yang sehari-harinya menggembalakan sapi ini memperkirakan kerugian yang ia alami mencapai sekitar Rp80 juta. Ia beserta anak dan istrinya kemudian memutuskan untuk tinggal di tenda pengungsian yang ia dirikan di depan rumahnya hingga tiga bulan kemudian.

Seminggu kemudian, gempa kembali melanda Lombok Utara dan Lombok Timur pada tanggal 5 Agustus 2018 dengan kekuatannya sebesar 7 skala richter. Kali ini, gempa meruntuhkan bangunan yang tersisa, termasuk rumah sesama warga Sambik Elen, Admirudin.

"Hancur, rata dengan tanah, tinggal tembok-temboknya sedikit-sedikit," tutur ayah tiga anak ini tentang kondisi rumahnya pasca gempa. Petani yang saat itu baru saja menunaikan sholat magrib bersama keluarga ini terpaksa mengungsi di salah satu tempat pengungsian massal di tepi jalan selama tiga bulan.

Selain kehilangan tempat tinggal dan harta benda, Ahmawi dan Admirudin juga kehilangan dokumen kependudukan. "Rusak tertimpa bangunan sehingga sudah tidak bisa terbaca lagi, kena batako," tutur Ahmawi yang kehilangan Kartu Keluarga (KK). Admirudin juga

kehilangan KK yang ia simpan di dalam lemari di dalam rumah. "KK-nya kena tertimbun reruntuhan, pas kita cari-cari, sudah hilang," ujarnya.

Program LABKD diinisiasi tahun 2017 oleh KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Pemerintah Australia mendukung fasilitas ini sebagai bagian dari upaya bersama Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan.

Padahal dokumen kependudukan menjadi syarat pendaftaran berbagai bantuan yang sangat diperlukan warga korban bencana. "Syarat dari semua bantuan itu kan harus ada KK dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), baik itu Rumah Tahan Gempa (RTG) dan bantuan-bantuan lainnya," jelas Admirudin yang segera berusaha untuk mengurus kembali KK-nya.

Admirudin sempat khawatir akan mengalami kesulitan untuk mengurus dokumen kependudukan. Jarak antara Desa Sambik Elen ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Utara mencapai 1.5 jam dengan kendaraan umum.

Sedangkan dalam prosesnya, warga harus bolak-balik setidaknya dua kali. "Itupun bisa satu sampai dua minggu prosesnya," keluh Admirudin akan pengalamannya mengurus KTP dan KK di masa sebelum gempa.

Beruntung, Desa Sambik Elen saat itu telah memiliki Kelompok Kerja Administrasi dan Kependudukan (Pokja Adminduk). Pokja Adminduk adalah petugas yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala desa untuk membantu pengurusan dokumen kependudukan masyarakat. Mereka umumnya terdiri dari tokoh masyarakat dan perangkat desa. Pokja Adminduk merupakan salah satu komponen utama program Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), fasilitas layanan Adminduk menggunakan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa (Pemdes).

Program LABKD diinisiasi tahun 2017 oleh KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Pemerintah Australia mendukung fasilitas ini sebagai bagian dari upaya bersama Pemerintah Indonesia dalam mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan, sebagai solusi atas berbagai hambatan yang selama ini dialami warga desa saat mengakses layanan Adminduk, seperti jarak yang jauh, biaya yang membebani, dan prosedur yang rumit.

Di tengah kondisi bencana, KOMPAK memfasilitasi Pokja Adminduk untuk mendata warga yang kehilangan dokumen akibat gempa. Disdukcapil menanggapi dengan membuka layanan darurat penerbitan dokumen kependudukan bagi korban gempa.

"Kami langsung mengaktifkan jaringan pelayanan dengan meminta bantuan ke pusat melalui teknis Dirjen Dukcapil pada hari kedua pasca gempa," papar Kepala Seksi Inovasi dan Kerja Sama Dukcapil Lombok Utara, Arif Aryadi. Bupati Lombok Utara saat itu, Najmul Ahyar segera membuat Peraturan Bupati (Perbub) tentang pendataan adminduk masa darurat bencana dan menurunkan Surat Keputusan bagi tim pelaksana.

Pokja Adminduk Desa Sambik Elen, Samiun, segera melaksanakan tugasnya. "Setelah gempa, berselang dua tiga hari, kami menemukan banyak warga yang hilang dokumen, padahal BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) meminta data warga yang terdampak, lengkap dengan fotokopi KK dan KTP-nya" tutur pria yang berusia 39 tahun ini.

Samiun segera berkoordinasi dengan kepala dusun di masing-masing desa. "Kita minta data yang perlu bantuan dari kepala desa, lalu kita buat pengantar dan dokumen yang diperlukan, dan kita teruskan

ke Dukcapil untuk diproses," papar ayah 3 anak ini.

Dokumen kependudukan pun dapat selesai hanya dalam waktu 3 hingga 4 hari. "Dalam sehari, operator Dukcapil dapat memproses 100 hingga 150 data per hari selama periode 4 bulan dari Agustus hingga Desember 2018," papar Arif Aryadi. Pokja Adminduk kemudian mengambil dokumen warga yang telah rampung di rumah salah satu staf Dukcapil di Kecamatan Bayan untuk kemudian mendistribusikannya pada warga.

"Pak Samiun ini tanggap, ia merespon mana yang rusak dan diambil. Dia juga yang bikinkan, saya terima beres di rumah," puji Ahmawi terhadap kinerja Pokja Adminduk. Admirudin juga merasakan kemudahan yang sama. Ia sempat merasa kebingungan ketika diminta untuk membuat surat keterangan hilang ke polisi, namun Samiun

segera membantu, "biar saya yang bawa, biar kami yang kumpulkan dari desa," Admirudin menirukan ucapan Samiun.

Berkat lengkapnya dokumen kependudukan, Ahmawi dapat menerima bantuan RTG dan PKH (Program Keluarga Harapan) dari pemerintah. "Alhamdulillah dengan adanya dokumen tersebut ya bisa mendapatkan RTG kan. Bisa mendapatkan yang lain-lain seperti program PKH itu kan. Mungkin kalau tidak ada data tersebut mungkin tidak bisa juga kita dapat RTG," ujarnya gembira. Admirudin juga telah mendapatkan bantuan RTG di akhir tahun 2019.

Tiga tahun setelah gempa berlalu, semua warga Sambik Elen yang rumahnya mengalami kerusakan berat sudah mendapatkan bantuan rumah sebesar 4x6 meter sehingga tidak ada lagi yang harus tinggal di pengungsian.



▲ Layanan adminduk menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk memastikan warga penyintas gempa mudah mendapatkan bantuan pemerintah.

“Kalau yang rusak sedang, ada enam keluarga yang juga sudah mendapatkan dan sedang proses pengerjaan,” papar Samiun.

Kelengkapan dokumen juga Ahmawi rasakan dalam kehidupannya sehari-hari kini. “Anak-anak masuk sekolah, mana KK, gitu kan dibiling gurunya, banyak lah, nggak bisa saya sebutkan satu persatu, dengan adanya KK dan KTP,” ujarnya. Kini, sekitar 93% dari 1124 keluarga di 8 dusun di Sambik Elen telah memiliki kelengkapan dokumen, baik KTP, KK, akta kelahiran maupun Kartu Identitas Anak (KIA).

KOMPAK tengah mempersiapkan digitalisasi dokumen Adminduk, di mana seluruh dokumen kependudukan di KLU akan disimpan secara digital dalam server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan server cadangan Dukcapil kabupaten. ■

Pelayanan Adminduk di Lombok Utara juga sudah semakin menjangkau ke desa dengan terbitnya Perbup No, 2 Tahun 2021 tentang Layanan Adminduk Berbasis Desa, yang sudah terlaksana di 6 desa yakni Desa Sambik Elen, Senaru, Jenggala, Tanjung, Pemenang Barat dan Malaka.



▲ Pelayanan pengurusan dokumen kependudukan pasca gempa di kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Utara.

Selain itu sudah ada integrasi pelayanan Adminduk di semua Puskesmas, hasil kerja sama Dinas Kesehatan dengan Dukcapil. “Artinya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Adminduk sekarang semakin mudah karena sudah sampai ke tingkat desa,” tegas Bupati Lombok Utara, H. Johan Syamsu.

Program Adminduk terus berkembang, terutama dalam merespon kebutuhan dokumen kependudukan di masa bencana. KOMPAK tengah mempersiapkan digitalisasi dokumen Adminduk, di mana seluruh dokumen kependudukan di KLU akan disimpan secara digital dalam server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan server cadangan Dukcapil kabupaten.

“Ke depannya, dalam situasi pasca bencana, penduduk yang kehilangan dokumen kependudukan tidak perlu lagi kebingungan karena dokumen kependudukan mereka sudah disimpan salinannya secara digital di server. Dalam kondisi bencana, warga cukup menyebutkan nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), alamat, tempat tinggal lahir, maka operator akan dapat langsung mencetak dokumen kependudukan mereka,” papar Susana Dewi, *Frontline Service Coordinator* KOMPAK untuk Provinsi NTB.

Gempa memang merupakan musibah yang tidak dapat diprediksi, namun dengan adanya sistem data kependudukan yang baik, setiap korban dapat segera mendapatkan bantuan dan dukungan yang sangat mereka butuhkan.